



PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia)

Suyahman

Univet Bantara Sukoharjo

ABSTRAK

Education for all merupakan suatu konsep yang idealistik dalam konteks pendidikan, mengapa karena tidaklah mungkin untuk dapat diwujudkan secara sempurna dan maksimal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya faktor budaya, faktor kesadaran masyarakat, faktor teknologi dan sebagainya. Sebenarnya Pendidikan untuk semua di Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan amanah para pendiri negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang kemudian ditindaklanjuti dengan pasal 31 UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya perlakuan diskriminatif antara anak-anak kaya dengan miskin, anak-anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga yang tercipta adalah bukan pendidikan untuk semua, tetapi pendidikan untuk yang pembeda dan pendidikan untuk si kaya. Namun demikian, sumbang pemikiran, ide dan gagasan untuk mewujudkan konsepsi pendidikan untuk semua tetap diperlukan, sehingga dapat meminimalisir fenomena-fenomena yang bertentangan dengan substansi pendidikan untuk semua.

Kata kunci: Pendidikan Untuk Semua, Antara Harapan dan Kenyataan

PENDAHULUAN

Mencermati interaksi antara pembukaan UUD 1945 alinea keempat, UUD 1945 pasal 31 dan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5, maka sangat jelas dan tegas bahwa eksistensi pendidikan itu untuk semua artinya untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecualinya. Namun bagaimana realitanya apakah para pejabat negara, para pembuat kebijakan, para pengelola lembaga – lembaga pendidikan formal, dan juga para guru sudah melaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab. Jawabnya sederhana belum, karena dalam realitanya banyak ditemukan berbagai kasus baik di kalangan masyarakat kota, masyarakat menengah dan yang memprihatinkan pada masyarakat pedalaman. Apa yang menjadi amanah dari 3 aturan tersebut sama sekali belum terwujud secara merata, dan berada dalam kesenjangan yang sangat dalam. Pendidikan gratis dengan di topang dana BOS, dalam kenyataannya banyak juga sekolah yang melakukan pungutan dengan berbagai alasan. Adanya sekolah yang secara terang-terangan tidak mau menerima seorang anak katanya tidak memenuhi kriteria dari sekolah yang bersangkutan, sistem seleksi penerimaan siswa baru di tiap tahun ajaran selalu diwarnai dengan KKN. Banyaknya fenomena ini seharusnya rakyat dapat menggugat karena ini bertentangan dengan Amanah 3 aturan tersebut, bahkan boleh kami katakan pelanggaran HAM di bidang pendidikan. Kalau seperti ini dibiarkan untuk apa ikon pendidikan untuk semua, atau sebaliknya diganti saja pendidikan untuk si kaya.

Tulisan ini mencoba menganalisis fenomena-fenomena yang terkait langsung dengan makna yuridis, makna praktis tentang konsepsi pendidikan untuk semua. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diuraikan dalam makalah ini yaitu: bagaimanalah konsepsi pendidikan untuk semua dan karakteritiknya, bagaimana kondisi pendidikan untuk semua saat ini, bagaimana kondisi pendidikan untuk semua yang diharapkan, dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan untuk semua.

A. Konsepsi Pendidikan Untuk Semua dan Karakteritiknya

Konsep Education for All merupakan sebuah ide atau rancangan yang sudah terbentuk dalam pikiran manusia berkenaan dengan pemerataan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang dan status sosial seseorang. Education For All atau pendidikan untuk semua merupakan salah satu konsep pendidikan yang seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai slogan ketika ada kegiatan kampanye atau bangsa saja, tapi merupakan sebuah solusi atau alternatif dalam mengatasi masalah pendidikan. Education for All merupakan penjabaran UUD 1945 mengenai pendidikan untuk warga negara Indonesia.

Sebuah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



negara dalam kehidupan negeri ini. Maka, pemerataan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran tidak hanya terbatas pada kelompoknya yang mampu saja, namun harus menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat. Istilah pendidikan untuk semua atau Education for All mulai digunakan pada waktu kawasan Asia Pasifik menyusun program yang disebut APPEAL (Asia Pasific Programme of Education for All). Program ini disusun oleh kantor prinsipal UNESCO untuk Asia Pasifik (Bangkok, Thailand) yang waktu itu dipimpin oleh Prof.Dr.Makaminan Makagiansar (almarhum) dan beliau mendampingi direktur jenderal UNESCO yang mengumumkan pelaksanaan APPEAL dari New Delhi di bulan Februari 1987. Program Asia Pasifik tentang pendidikan untuk semua (APPEAL) ini terdiri dari tiga buah sub-program, yakni (a) Pemberantasan buta huruf, (b) Universalisasi pendidikan (sekolah) dasar, dan (c) peranan pendidikan dalam pembangunan. Setiap negara di kawasan Asia Pasifik membentuk suatu badan antardepartemen untuk melaksanakan APPEAL di negara masing-masing. Indonesia tidak ketinggalan dan badan antar departemen Education For All merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah pendidikan khususnya berkenaan dengan pemerataan pendidikan. Semua orang berhak dan wajib untuk belajar supaya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan bisa memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang agar lebih baik lagi. Pertemuan Forum Pendidikan se-dunia yang diselenggarakan di Dakar, Senegal, pada 26 sampai 28 April 2000, berakhir dengan disepakatinya Rancangan Kerja Dakar untuk Aksi (The Dakar Framework for Action) yang membidangi komitmen menyeluruh yang vital untuk mencapai pendidikan untuk semua (Education For All) pada 2015. Titik tekan kerangka kerja dakar untuk aksi ini adalah secara utuh memenuhi kebutuhan pengajaran, memantapkan aksi untuk menjamin terlaksananya berbagai komitmen yang dibuat tidak hanya di dakar tetapi juga di berbagai pertemuan internasional pada 1990-an, di samping deklarasi HAM dan Konvensi Hak Anak (CRC).

Dari beberapa faktor Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah dan tantangan, faktor yang paling dominan yang menyebabkan banyak anak putus sekolah ialah faktor ekonomi jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Idealnya, setiap keluarga harus

berpenghasilan yang cukup besar sehingga dapat membiayai semua kebutuhan hidup, namun dalam kenyataannya hal itu sulit untuk dicapai, karena kebutuhan dan keinginan yang berkembang sedemikian cepat sehingga berapa pun penghasilan yang didapatkan selalu tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan. Education for All atau pendidikan untuk semua merupakan sebuah solusi atau alternatif dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut. Education for All atau Pendidikan untuk semua merupakan penjabaran UUD 1945 mengenai pendidikan untuk masyarakat. Sebuah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam kehidupan negeri ini.

B. Pendidikan Untuk Semua Saat Ini

Benni Setiawan (2008) Berkenaan dengan Education for All, buku ini berusaha mengkritisi tentang sempitnya pemahaman masyarakat mamaknai pendidikan itu sendiri, yang mana dalam pandangan masyarakat, pendidikan itu identik dengan sekolah, pesantren dan Perguruan Tinggi, sehingga jika ada orang yang tidak pernah mengalami itu semua dianggap tidak berpendidikan. Selain itu buku ini juga mengkritisi pendidikan Indonesia yang banyak meniru model sekolah barat, sehingga hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan mengakibatkan kalangan bawah tidak mampu untuk menjangkaunya. buku ini mengkaitkannya dengan; dana BOS tidak diselewengkan, reorientasi sekolah unggul, bisnis pendidikan, sekolah mahal, eksistensi sekolah dan pendidikan sebagai anak tiri. Dalam mewujudkan pendidikan untuk semua Benni juga menyarankan agar semua pihak harus berperan aktif baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi dan masyarakat itu sendiri

Education for All yang sudah menjadi impian anak-anak yang sudah seharusnya memenuhi paket wajib belajar. Buku yang ditulis Dewi Salma Prawiradilaga & Eveline Siregar yang berjudul Mozaik Teknologi Pendidikan. Dalam buku ini bahasan tentang Education for All ditulis oleh W.P Napitupulu dengan sub bab Pendidikan untuk Semua dan Semua untuk Pendidikan. Ia menjelaskan bahwa istilah Education for All digunakan pada waktu kawasan Asia Pasifik menyusun program yang disebut APPEAL (Asia Pasific Programme of Education for All). Program Asia



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Pasifik tentang APPEAL terdiri dari tiga sub-program, yakni (1) Pemberantasan Buta Huruf, (2) Universalisasi Pendidikan (Sekolah) Dasar, dan (3) Peranan Pendidikan dalam Pembangunan. Selain itu, Napitupulu juga menjelaskan tentang tujuan dan strategi untuk meraih tujuan Pendidikan untuk Semua, serta menjelaskan bahwa istilah „semua” pada „pendidikan untuk semua” berarti semua orang, tua -muda, besar-kecil, kaya-miskin, dan seterusnya harus memperoleh pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Selain itu, kata „semua” juga berarti semua lembaga, baik lembaga pemerintah/negara maupun lembaga swasta/masyarakat, bukan hanya tugas utamanya di jajaran pendidikan, tetapi perlu dan harus mensukseskan proses pendidikan dan pembelajaran di Indonesia khususnya. Inilah yang sering disebut dengan istilah tanggung jawab dipikul oleh orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah dan bahkan peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang gemar belajar-membelajarkan (*learning teaching society*).

Artikel yang ditulis oleh Adi Permana dan Felix Marta yang berjudul Pendidikan untuk Semua: Setiap Anak Indonesia Harus Mendapatkan Hak Pendidikannya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pendidikan formal di Indonesia memang seperti „barang langka” bagi sebagian besar rakyat Indonesia, namun demikian Adi Permana dan Felix telah menelaah masalah pendidikan tersebut dari sudut pandang pendidikan dan menemukan, diantaranya: adanya kemauan pemerintah dan masyarakat miskin yang peduli akan pendidikan, melakukan peninjauan kembali tentang tujuan pendidikan itu sendiri, menghapus pendidikan mahal di segala tingkatan, membuka jalur-jalur pendidikan gratis, baik itu dari anggaran APBN dan APBD maupun dari donatur-donatur, dan mengupayakan pendidikan agar tercipta iklim demokrasi yang baik.

Artikel yang ditulis oleh dr. Sunarto yang berjudul “Pendidikan untuk Semua Gratis bagi Masyarakat, Mahal bagi Negara”. Dalam artikel ini dr. Sunarto complain terhadap pendidikan gratis bagi masyarakat Yogyakarta, yang mana bagi mereka yang berada dalam wilayah kekuasaan kependidikan masih beranggapan bahwa pendidikan tidak mungkin gratis, padahal di daerah lain sudah menerapkannya, seperti Sukoharjo, Banyuasin, Natuna dan lainnya. Ia juga mengklaim bahwa

DIY yang sangat berpotensi sebagai kota pendidikan mestinya lebih mengutamakan warganya agar mudah mendapatkan akses pendidikan secara gratis dan bermutu. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang konstitusi berkenaan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, baik itu Undang-Undang maupun peraturan-praturan pemerintah lainnya. Ia menghimbau agar pendidikan di Indonesia khususnya di DIY harus merata, sehingga warga bisa merasakan pendidikan yang gratis dan bermutu serta pengoptimalan dana-dana pendidikan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.

Artikel yang ditulis oleh Lembaga Kata Fustos yang berjudul “Progress and Setbacks Toward Education for All”. Artikel ini menjelaskan bahwa: Kurangnya pendidikan dasar pada anak terkait kesehatan, kemiskinan, kesempatan kerja yang lebih sedikit, dan penurunan partisipasi politik di kemudian hari. Faktor utama penghambat pendidikan universal adalah kurangnya pembiayaan di negara berkembang

Menurut UNESCO 2010 Education for All (EFA) Laporan Pemantauan Global, menurut laporan itu, banyak negara-negara termiskin di dunia tidak berada di jalur untuk memenuhi tujuan EFA pada tahun 2015. Kemajuan menuju Kerangka Aksi Dakar, sebuah dokumen yang komprehensif pada tujuan pendidikan global yang diadopsi pada tahun 2000, telah terkikis di negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kekurangan pendapatan dan tingkat penurunan bantuan dari negara-negara berpenghasilan tinggi selama krisis keuangan global telah sulit di negara-negara berkembang. Meski bantuan mulai bangkit lagi pada tahun 2008, kekurangan kumulatif dalam pembiayaan substansial dan mengancam kemajuan yang dibuat dalam 10 tahun terakhir terhadap target pendidikan penting. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, dunia tidak akan memenuhi tujuan pendidikan global tahun 2015. Selain itu, dalam artikel ini juga menawarkan beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mencapai tujuan Education for All, yaitu: Pertama, mengatasi kesenjangan pendidikan dimulai dengan meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas. Ini mencakup penurunan biaya sekolah, dan menyediakan tunjangan atau subsidi untuk keluarga miskin sehingga mereka bisa sekolah, seperti



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



membantu persediaan buku, dan seragam. Selain itu, memperluas jaringan sekolah untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil sangat penting. Kedua, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Data dari Asia Selatan dan Barat, serta sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa sejumlah besar anak-anak tidak mencapai tingkat minimum melek huruf dan angka keterampilan, bahkan ketika mereka menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Lebih buruk lagi, banyak putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan penuh utama mereka. Kecenderungan ini bisa berubah dengan bantuan fasilitas belajar yang lebih memadai dan lebih banyak guru yang memenuhi syarat.

C. Pendidikan Untuk Semua Yang Diharapkan

Agar mendapatkan suatu gambaran konkrit tentang EFA yang diharapkan ada baiknya dimulai dari konsep pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh : Ki Hajar Dewantara, sebagai Tokoh Pendidikan Nasional Indonesia, peletak dasar yang kuat pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut : “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya (Ki Hajar Dewantara, 1977:14) “. Selanjutnya payung hukum atau asas legalitas tentang konsepsi pendidikan diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.

Persoalannya adalah bukan masalah pengertian pendidikan itu sendiri akan tetapi konteks dalam pendidikan yaitu pendidikan untuk semua (EFA) yang harus dimaknai secara benar sehingga tidak dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Jangan sampai makna EFA dipolitisir sehingga akan kehilangan rohnyanya dan berdampak menjadi akar masalah pendidikan yang semakin kompleks. Hakekat dari “Pendidikan untuk Semua” adalah mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Hal ini sebagai upaya memenuhi amanah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 5 ayat 5 “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Berdasarkan konsep pendidikan tersebut maka dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah subyek dari pendidikan. Karena merupakan subyek di dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Jika memperhatikan bahwa manusia itu sebagai subyek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah, manusia sebagai subyek pendidikan harus bebas untuk “ada” sebagai dirinya yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan EFA, semua komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun warga negara secara individual, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskannya sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing. Strategi penting yang diadopsi: Memastikan dukungan dana untuk PUS atau EFA Mempromosikan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Kita semua menginginkan agar EFA di Indonesia dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Untuk mewujudkan EFA yang demikian maka diperlukan strategi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Strategi yang dimaksud yaitu : internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Sedangkan eksternal, adalah masyarakat pada umumnya. Dimana, masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

D. Kendala Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua

Mewujudkan EFA sesuai yang diinginkan oleh semua pihak memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, hal ini diperlukan proses yang panjang dan sistematis. Keterlibatan semua unsur sangat diperlukan dimana juga kesadaran masyarakat menjadi daya dukung untuk terwujudnya maksud tersebut. Memang diakui munculnya kendala-kendala dalam mewujudkan EFA sangat dipengaruhi dengan banyaknya permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia. empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, masalah yang dimaksud yaitu: Masalah pemerataan pendidikan. Masalah mutu pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan. dan Masalah relevansi pendidikan.

Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut masing – masing dikatakan teratasi jika pendidikan :

1. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya: Semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan.
2. Dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya: Perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
3. Dapat terlaksana secara efisien, artinya: Pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.
4. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya: Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Pada dasarnya upaya mewujudkan konsepsi pendidikan untuk semua bisa terwujud apabila Pertama, Gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana daya. Kedua, Kondisi satuan – satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidikan yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya. Meskipun demikian pemerataan pendidikan tidak dapat diabaikan karena upaya tersebut, terutama pada saat-saat suatu bangsa sedang mulai membangun mempunyai tujuan ganda, yaitu di samping tujuan politis (memenuhi persamaan hak bagi rakyat banyak) juga tujuan pembangunan, yaitu memberikan bekal dasar kepada warga negara agar dapat menerima informasi dan memiliki pengetahuan dasar untuk mengembangkan diri sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

E. Simpulan

1. Education for All adalah suatu model pendidikan tanpa membedakan strata sosial, etnis, budaya, agama dan lainnya. Model pendidikan ini berbasis egaliterian, karena dalam implementasinya tidak didasarkan pada stratifikasi sosial, semuanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Konsep Education for All berarti suatu model pendidikan yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin, sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pendidikan Islam, yaitu prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa diskriminasi.
2. Adanya Education for All diharapkan bisa membantu masyarakat yang kurang beruntung agar bisa mengenyam pendidikan.
3. Adapun mewujudkan Education for All dalam pendidikan di Indonesia ialah dengan: Berbenah dan mewujudkan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



wajib belajar 12 tahun. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, wajib belajar tidak hanya sembilan tahun saja, tapi harus berbenah dan mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Pendidikan harus bersifat continue dan berkelanjutan kalau bisa sampai ke perguruan tinggi, Memberikan hak pendidikan kepada perempuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu serta tidak mudah ditipu daya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. c. Dana BOS tidak diselewengkan, demi kepentingan bersama khususnya mereka yang membutuhkan. Sedangkan upaya mewujudkan Education for All

Fitri, “Kualitas Pendidikan: Indeks Pendidikan untuk Semua Masih Stagnan”, <http://cetak.kompas.com/read/2012/10/20/04385981/indeks.pendidikan.untuk.semua.masih.stagnan> diakses 14 Nopember 2015 Jam 12.00 WIB.

Gunawan, Ary H. 2010. *Sosiologi Pendidikan : Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Lembaga Kata Fustos, “Progress and Setbacks Toward Education For All”, <http://www.prb.org/publications/articles/2010/educationforall.aspx> diakses 06 Nopember 2015 Jam 11.26 WIB.

Ekosusilo, Madyo-Kasihadi RB, 1988, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Semarang; Effhar Publishing.

Kadir, Abdul, 2012, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.<http://isaninside.wordpress.com/> diakses pada tanggal 27 November, jam.21;00

Mardiatmadja, BS.1986. *Tantangan Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius. Nandika, Dodi. 2007. *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Permana, Adi dan Felix Marta, “Pendidikan untuk Semua: Setiap Anak Indonesia Harus Mendapatkan Hak Pendidikannya”<http://edukasi.kompasiana.com/2015/04/02/pendidikan-untuk-semua-353503.html>, diakses 06 Nopember 2015 Jam 12.26 WIB.

Prawiradilaga, Dewi Salma & Siregar, Eveline. 2004. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Saroni, Muhammad. 2013. *Pendidikan untuk Orang Miskin : Membuka Keran Keadilan dan Kesetaraan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Setiawan, Benni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abrasyi, Muhammad „Athiyyah. 2003. *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arifin. 1996. *Ilmu Pendiidkan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Assegaf, Abd. Rachman. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma Baru Pendidikan*

Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif. Jakarta: Rajawali Pers. Bakar, Usman Abu &

Surohim. 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang SISDIKNAS)*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Danim, Sudarman. 2010. *Pengantar Kependidikan Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidian*. Bandung : AlfaBeta

Fauzi, Ilham “Education for All”, <http://weloveblitar.blogspot.com/2015/02/education-for-all.html> diakses 14 Nopember 2015 Jam 11.50 WIB.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Sunarto, “Pendidikan untuk Semua Gratis bagi Masyarakat, Mahal bagi Negara”

<http://medicine.uui.ac.id/index.php/Artike/Pendidikan-Untuk-Semua-Gratis-BagiMasyarakat-Mahal-Bagi-Negara.html>, diakses tanggal 06 Nopember 2015 Jam 10.10 WIB.

Supriyatno, Triyo. 2009. *Humanitas-Spiritual dalam Pendidikan*. Malang: UIN-Malang Press.

SusieMiles and Nindhi Singal, “The Education for All and Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction or Opportunity?”, <http://www.org/publication/articles/2010/educationforall.aspx>, diakses 06 Nopember 2015 Jam 11.26 WIB.

Syahrul, Firtiani F. 2012. *Pintar Saja Tidak Cukup (Menggali Potensi di Sekolah Inklusif)* Jakarta: Lentera Insan CDEC 2.

Tilaar, H.A.R.2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vanani, “Pemerataan Pendidikan di Indonesia”, <http://vanani.student.um.ac.id/pemera-taan-pendidikan-di-indonesia/vanani> diakses 30 Mei 2013, Jam 11.00 WIB.

Wiyani, Novan Ardy & Barnawi. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam: Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokotomik-Holistik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

World Conference On Educational for all : meeting Basid learning needs, Jomtien, Thailand, 5-9 Maret 1990; terjemahan

W.P. Napitupulu, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: November 2009 dalam Buku Dewi Salma Prawiradilaga & Eveline Siregar, *Mozaik Teknologi Pendidikan (Jakarta: kencana, 2008)* Ed. 1, cet. 3, hlm. 335